

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
2025**



**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi : a) Terwujudnya Komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; b) Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Dalam melaksanakan PPID prinsip pelayanan informasi meliputi : a) Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; b) Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; c) Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID. Kebijakan pelayanan informasi dituangkan dalam maklumat pelayanan informasi sebagai berikut : "Kami berupaya memberikan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan sungguh-sungguh untuk dapat : 1). Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu; 2). Memberikan Kemudahan dalam mendapatkan informasi publik sesuai ruang lingkup Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan; 3). Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; 4). Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; 5). Menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku; 6). Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik; 7). Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun media; 8). Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani; 9). Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana"

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dilaksanakan secara terpusat oleh unit PPID LRSDKP. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan secara langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi dan pelayanan tidak

langsung melalui laman web <https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-riset-sumberdaya-dan-kerentanan-pesisir-padang/>. Pelayanan publik yang dilakukan secara offline melalui ruang layanan dengan fasilitas ditunjukkan pada Gambar 1. Sedangkan layanan melalui online melalui kanal web yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Ruang Tunggu 1



Ruang Tunggu 2



Ruang Tunggu 3



Ruang Pelayanan

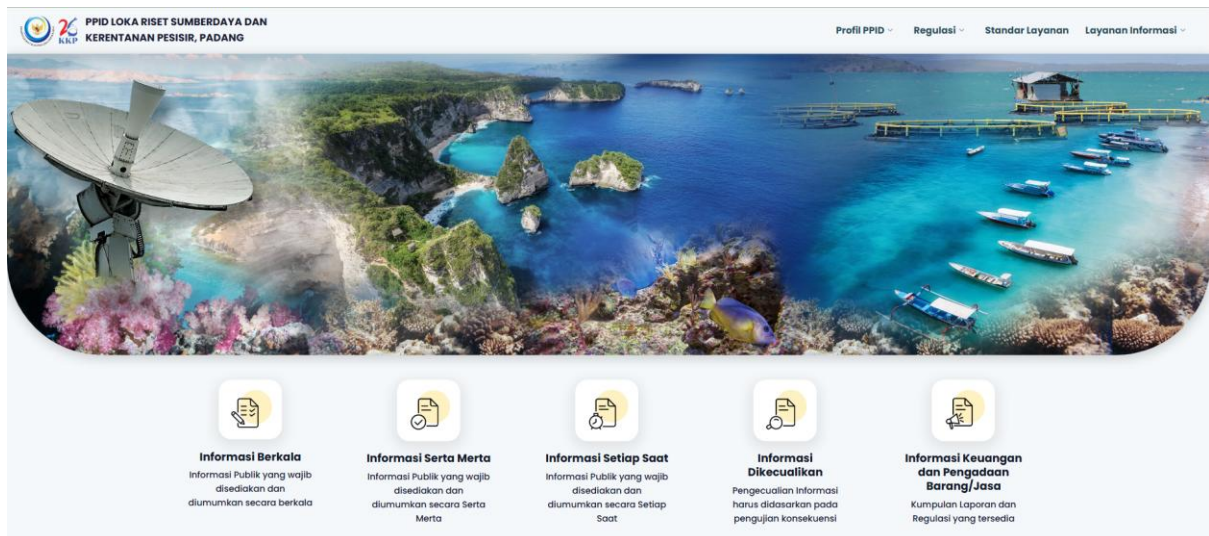


Bahan Bacaan



Ruang Arsip

Gambar 1. Fasilitas Layanan Terpadu melalui offline



Gambar 2. Fasilitas Layanan Terpadu melalui online

3. Rincian Pelayanan Publik LRSDKP

Selama tahun 2025 hanya ada 3 permohonan informasi yang masuk ke LRSDKP pada bulan Mei dan Juni. Kondisi ini terjadi karena Organisasi dan Tata Kerja (OTK) unit kerja belum ditetapkan secara resmi sehingga struktur PPID beserta mekanisme operasionalnya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun permohonan informasi yang masuk pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Perolehan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data				Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Alasan Ditolak	Cetak	Tatap Muka/Lisan	Online
MEI									
1	Visit								
2	Aplikasi								
3	Surat	2	2	2				✓	✓
4	Email								
JUNI									
1	Visit								
2	Aplikasi								
3	Surat	1	1	1				✓	✓
4	Email								
Total									

- Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik selama 1 hari kerja setelah permintaan diterima dan di verifikasi.
- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 3 permohonan.
- Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak : 0
- Jumlah sanggahan/sengketa informasi : 0

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan dan pelayanan informasi pelayanan publik sampai bulan Desember 2025 terkait sengketa pelayanan informasi tidak ada (Nihil). PPID LRSDKP berhasil mencapai target "Menuju Informatif" dengan nilai 80,11. Nilai tersebut diperoleh karena adanya beberapa data yang ditampilkan LRSDKP tidak dapat diakses atau kurang sesuai oleh tim pemeriksa. Sedangkan untuk nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 LRSDKP memperoleh nilai 86,11

Susan KKP Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus

Laporan SKM Detail
Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM Triwulan 4 2025 [Submit](#)

50 Data terakhir Tw 4/2025 - Kepmen 20/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

[Download Data](#)

10 entries per page loka riset sumber

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bpsdm	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus	2025	4	5.00	86.11	1

Showing 1 to 1 of 1 entries

[Download Data](#)

5. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dari hasil pelayanan informasi yang diminta oleh publik sebanyak 3 informasi, semua dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga sampai bulan Desember 2025 pelaksanaan layanan informasi belum terdapat kendala.

6. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik

Belum terdapat kendala yang berarti terkait pelaksanaan layanan informasi (PPID LRSDKP), sehingga belum terdapat rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti. Walaupun demikian LRSDKP tetap berkomitmen dan berusaha memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan publik baik berupa sarana dan prasarana maupun petugas pelayanan informasi publik.

Padang, Januari 2025
Kepala Loka Riset Sumber
Daya
dan Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana baik pada unit organisasi eselon I maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa salah satu tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni tahap evaluasi mandiri dilakukan melalui pengisian kuesioner, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari dua kategori unit kerja yang telah diklasifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari tahapan pengisian kuesioner penilaian mandiri (*Self Assessment Questionnaire/SAQ*) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ZAKI MUBAROK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025
TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI
MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

A. Informatif (Nilai 90 s.d. 100)

PPID Pelaksana Eselon I

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	100
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	100
3.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	100
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
6.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
7.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	100
8.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
9.	Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100

PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	100
2.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	100
3.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	100
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	100
5.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	100
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	100
7.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	100
8.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	100
9.	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	100
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	100

11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	100
12.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	100
13.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	100
14.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	100
15.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	100
16.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi	100
17.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	100
18.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang	100
19.	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem	100
20.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	100
21.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Ambon	100
22.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa	100
23.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual	100
24.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak	100
25.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	100
26.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	100
27.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	100
28.	Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	100
29.	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	100
30.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	100
31.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram	100
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Sorong	100
33.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon	100
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh	100
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II	100
36.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan	100
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate	100
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang	100
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon	100
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung	100
41.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan	100

	Hasil Perikanan (BKIPM) Banjarmasin	
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam	99,90
43.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	99,90
44.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	99,88
45.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	99,80
46.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	99,80
47.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor	99,73
48.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	99,70
49.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I	99,70
50.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merak	99,60
51.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	99,50
52.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap	99,40
53.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	99,38
54.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak	99,35
55.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	99,35
56.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	99,30
57.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke	99,11
58.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	99,05
59.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo	98,88
60.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura	98,85
61.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar	98,80
62.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	98,55
63.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Luwuk Banggai	98,50
64.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Yogyakarta	98,50
65.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna	98,50
66.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan	98,25
67.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta	97,85
68.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima	97,80
69.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	97,60
70.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	97,52
71.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	97,32
72.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	97,31
73.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bengkulu	97,30

74.	Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros	97,10
75.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangkaraya	96,93
76.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam	96,85
77.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan	96,83
78.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi	96,78
79.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	96,32
80.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	96,05
81.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkal Pinang	95,82
82.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong	95,68
83.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bau - Bau	95,58
84.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	95,45
85.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	95,40
86.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung	95,40
87.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang	95,10
88.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Medan II	94,80
89.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang	94,65
90.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon	94,63
91.	Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	94,18
92.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak	94,10
93.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	93,35
94.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju	93,35
95.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado	93,13
96.	Balai Uji Standar KIPM	93,05
97.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	92,90
98.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	92,80
99.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	92,65
100.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Gorontalo	92,60
101.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	92,42
102.	Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta	92,17
103.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Boalemo Gorontalo	92,15
104.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol Buleleng Singaraja	92,10
105.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang	91,60
106.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,41
107.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	91,35

B. Menuju Informatif (Nilai 80 s.d. 89,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	89,81
2.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	89,80
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	89,02
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	88,64
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Medan I	88,30
6.	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	86,57
7.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	85,81
8.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	84,75
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya II	84,62
10.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	84,21
11.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palu	83,65
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	82,85
13.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	82,70
14.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	82,36
15.	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	82,19
16.	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	82,17
17.	Balai Besar Penangkapan Ikan	81,98
18.	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang	80,11
19.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon	80,10

C. Cukup Informatif (Nilai 60 s.d. 79,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar	79,80
2.	Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi	79,27
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	79,02
4.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	76,10
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong Aceh	74,55
6.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	74,15
7.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Wakatobi	72,70
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tanjung Pinang	71,25
9.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru	70,82
10.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	70,19
11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	69,56
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	69,18

13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kendari	67,41
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta I	67,35
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	66,25
16.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tanjung Balai Asahan	62,87
17.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tahuna	62,10

D. Kurang Informatif (Nilai 40 s.d. 59)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	53,14
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	47,32

E. Tidak Informatif (Nilai < 39,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	0

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ZAKI MUBAROK



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.94/BDA/RSDM.510/I/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Yuniarto Yuniarto
NIP : 198206162010121002
Tempat Lahir : Semarang
Tanggal Lahir : 16 Juni 1982
Pangkat/ Gol. Ruang : 3c
Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama
Instansi : Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 6 (enam) jam pelajaran (JP).



DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik	1 JP
2. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 JP
3. Standar Pelayanan Publik	1 JP
4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1 JP
5. Indeks Kepuasan Masyarakat	1 JP
6. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 JP



Kepala Balai

R. Hernan Mahardhika



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : B.94/BDA/RSDM.510/I/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Abu Mustofa
NIP : 199402202025211039
Tempat Lahir : pamekasan
Tanggal Lahir : 20 Pebruari 1994
Pangkat/ Gol. Ruang : pengatur muda / V
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Instansi : Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Full E-Learning Pelatihan Pelayanan Publik

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 6 (enam) jam pelajaran (JP).



DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik	1 JP
2. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 JP
3. Standar Pelayanan Publik	1 JP
4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1 JP
5. Indeks Kepuasan Masyarakat	1 JP
6. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 JP



Kepala Balai

R. Hernan Mahardhika